

TRANSPARANSI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PENJOR

Anggun Meida Cintya¹, Rebina Ika Fitria Yumarnis², Sheyla Kurnia Sari³, Anang Sugeng Cahyono⁴, Slamet Haryanto⁵

Universitas Tulungagung^{1,2,3,4,5}

angguncintya12@gmail.com, rerebinaofficial@gmail.com, shellakurnia917@gmail.com,
akusukambahdi@gmail.com, slamethariyanto@gmail.com

Received: 21-12-2024

Revised: 22-01-2025

Approved: 20-02-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pembangunan di Desa Penjor serta efektivitasnya dalam meningkatkan pelaporan keuangan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pegawai operator yang mengakses aplikasi SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Penjor telah membantu dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis, efisien, dan transparan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti gangguan jaringan internet dan listrik, serta keterbatasan akses bagi masyarakat karena sifat privat dari aplikasi. Penelitian ini menganalisis penggunaan SISKEUDES berdasarkan lima pilar e-Government, yaitu dissemination, communication, transaction, integration, dan participation. Pilar komunikasi dan transaksi menunjukkan keberhasilan dalam implementasi, sementara pilar informasi dan partisipasi masih mengalami kendala, terutama terkait aksesibilitas masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Dengan demikian, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi serta mekanisme komunikasi yang lebih interaktif agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengawasan keuangan desa. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui optimalisasi aplikasi SISKEUDES.

Kata Kunci: *Transparansi, Aplikasi Siskeudes, E-Government, Pengelolaan Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki fungsi utama terletak pada pembangunan negara. Melalui undang – undang otonomi daerah pemerintah secara desentralisasi menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat diwilayahnya (Anon 2015). Dalam konteks pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, otonomi daerah telah menjadi topik yang menarik. Meskipun pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota menjadi fokus utama untuk otonomi daerah, otonomi desa, tingkat pemerintahan paling bawah adalah yang memiliki kedudukan terpenting (Desa and Terhadap 2014). Aparatur desa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sejajar dengan pemerintahan desentralisasi. Otonomi daerah merupakan bagian terpenting dari upaya, guna meningkatkan antusias masyarakat untuk mengambil keputusan terkait pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di suatu wilayah. (Ansyhariputra 2023). Dengan otonomi daerah, pemerintah sudah semestinya memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai budaya untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas (Cahyono et al. 2013). Desa diberi peluang untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri, dan memastikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat untuk memperkecil angka kemiskinan, serta kesenjangan sosial dan masalah lainnya dapat diminimalisir. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang adil serta berkelanjutan, desa

memegang peran penting dalam upaya pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Pengaturan desa didasarkan pada “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*” kata ayat (2) pasal 18B UUD 1945 (Ehfdxvh et al.,2022).

Sejalan dengan itu pemerintah dengan prinsip *good governance* mengedepankan salah satu aspek transparansi pengelolaan pelayanan publik dapat diimplementasikan dengan adanya pemanfaatan *electronic government (e-gov)*. Pemerintah digital, online government, maupun transformasi pemerintah adalah upaya untuk membangun sistem pemerintahan elektronik (Romanti 2023). Berbagai tingkat pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk desa, berusaha melakukan inovasi *e-gov* untuk memaksimalkan berbagai pelayanan desa, potensi desa yang bermanfaat bagi masyarakat dan desa. Situasi ini memberi peluang, khususnya pemerintah untuk bertindak secara strategis dan inovatif dalam hal pelayanan masyarakat (Cahyono, Sarahfina, and Destaru 2024). Sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan. Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007), *E-gov* berarti penggunaan teknologi informasi (*information*) dan komunikasi (*communication*) (ICT) dalam mendorong pemerintahan lebih fleksibel, menekankan biaya yang efektif, dan menyediakan kemudahan akses fasilitas layanan kepada masyarakat umum, yang pada gilirannya membuat pemerintah lebih bertanggungjawab kepada masyarakat (Zaliluddin, Budiman, and Rully 2020). Kementerian Dalam Negeri menciptakan penginputan data dana desa berbasis *e-gov* yang diimplementasikan melalui aplikasi SISKEUDES pada tahun 2015, aplikasi ini di rancang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) untuk membuat tata kelola keuangan desa lebih jelas (Ekonomika et al. 2019). SISKEUDES adalah salah satu rencana pemerintah untuk menerapkan aplikasi yang berbasis internet. Aplikasi tersebut membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan efektif (Hidayani, Kamilah, and Tambunan 2023).

PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 145 Tahun 2023 adalah peraturan umum yang berlaku selama lebih dari satu tahun. PMK tersebut mengatur tentang perencanaan anggaran, alokasi dana, pendistribusiann, manajemen anggaran, pertanggungjawaban dan laporan, penerapan, pengawasan dan penilaian, serta pemberhentian dan penundaan penyaluran Dana Desa (Jdih.kemenkeu 2023). Musrenbangdes menetapkan peningkatan pendapatan desa terhadap pelayanan masyarakat seperti halnya memenuhi pengembangan lembaga desa, pemenuhan kebutuhan dasar, dan aktivitas sosial lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, aparatur desa dan warga masyarakat harus memiliki kemampuan dalam menuangkan progam perencanaan pembangunan yang di susun setiap tahunnya (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022). Meskipun telah diadakannya Musrengbangdes, masyarakat masih khawatir mengenai pengelolaannya, karena efisiensi aparatur desa yang dianggap masih kurang kompeten.

Wilayah pedesaan adalah bagian terkecil diantara tingkatan struktur negara. Ini berbeda dengan kota, dimana banyak komunitas yang bekerjasama untuk membangun pemerintah negara bagian (Desa n.d.). Desa diberi lebih banyak tanggungjawab untuk menjalankan urusan mereka sendiri, mendapatkan otonomi, mengelola dana desa, dan membangun pemerintahan yang efektif seiring perkembangan daerah (Hidayani et al.

2023). Kabupaten Tulungagung sebagai satu wilayah di Propinsi Jawa Timur memiliki 257 (dua ratus lima puluh tujuh) desa telah menerapkan praktik e-gov. Penggunaan sistem e-gov dalam penginputan data dana desa salah satunya di desa Penjor diharapkan dapat membantu mewujudkan transparansi pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Sistem e-gov yang dimaksud yaitu penggunaan aplikasi yang telah diciptakan oleh Kementrian Dalam Negri yaitu SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) mudah digunakan aparatur desa dikarenakan memiliki fitur yang mudah dipahami, fitur yang praktis inilah yang membuat pemerintah lebih gampang untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Pembinaan serta pelatihan dari pemerintah pusat juga sudah dilakukan secara berkala, namun operator desa terkadang masih kebingungan seperti halnya saat mengoperasikan aplikasi masih saja terdapat kendala, dan terkadang masih belum kompeten dalam mengatasi sewaktu aplikasi tersebut mengalami error. Penggunaan aplikasi SISKEUDES hanya dapat diakses menggunakan jaringan online, dan hal ini juga terdapat kendala yang terjadi terkait jaringan/signal yang susah, mengingat desa Penjor yang berada di kawasan pegunungan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Transparansi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pembangunan Di Desa Penjor untuk mengelola data keuangan desa. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan transparansi dan akuntabilitas keuangan di desa Penjor, serta ingin mendapatkan informasi terkait kendala-kendala yang dialami dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES di desa Penjor.

Transparansi penggunaan aplikasi SISKEUDES terhadap pembangunan di desa Penjor ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017) yaitu mencakup 5 pilar yakni: 1) Penyebaran Informasi (information dissemination); 2) Komunikasi (communication); 3) Transaksi (transaction); 4) Integrasi (integration); dan 5) Partisipasi (participation). Menurut pendapat Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017) tahap ini merupakan tahap yang terpisah satu sama lain, tanpa adanya hierarki dari tahap rendah ke tahap yang tinggi. Alasan penggunaan istilah pilar, bertujuan untuk menilai tingkat maturitas progam e-gov. Model ini menjadi salah satu transformasi terkini, dan pengguna masih mengalami kendala (Sutrisno 2001). Model e-gov tersebut menjadi alat analisis yang dipilih dalam penelitian ini dimana tujuan dari artikel akan membahas tentang urgensi penggunaan aplikasi SISKEUDES terhadap transparansi pada pengembangan wilayah di Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian deskriptif menurut Creswell (2008) dikutip (Raco, 2018), pendekatan kualitatif adalah cara untuk memahami dan mempelajari gejala sentral, ini dapat membantu menemukan solusi untuk masalah saat ini yang berkaitan dengan fakta dan kenyataan yang ada. Metode kualitatif lebih berfokus pada observasi langsung dan penelitian lebih lanjut tentang apa realitanya. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah sumber data asli yang digunakan berupa hasil observasi dan riset dengan pegawai operator di Balai Desa Penjor yang dapat mengakses Aplikasi SISKEUDES. Sumber data sekunder meliputi dokumentasi aplikasi yang sudah tersedia dari Balai Desa Penjor. Disini penulis menguraikan masalah dan menganalisisnya secara menyeluruh, penulis juga mendapatkan gambaran tentang masalah yang terjadi saat penerapan Transparansi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Pembangunan di Desa untuk meningkatkan

pelaporan keuangan desa Penjor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aplikasi SISKEUDES Di Desa Penjor

Penerapan aplikasi SISKEUDES mulai diberlakukan pada tahun 2015, aplikasi ini berkesinambungan dengan Permendagri Thn. 2014 Nomor 113 terkait manajemen keuangan desa Permendagri Thn. 2018 Nomor 20 tentang Pengolaan Keuangan Desa dikeluarkan oleh Kemendagri untuk menggantikan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Anon 2015). Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan kebijakan baru ini. Tampilan aplikasi SISKEUDES versi 2.0 akan diperbarui dengan Permendagri No. 20 Thn. 2018 (Anon 2015). Di tahun 2018 aplikasi SISKEUDES mulai diimplementasikan secara menyeluruh ke desa-desa di kabupaten Tulungagung, namun sebelum itu pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) kabupaten Tulungagung memberi pengarahan seperti penjelasan aplikasi dan seperti apa cara untuk mengoprasikannya atau biasa disebut dengan Bimtek (Bimbingan Teknis). Aplikasi SISKEUDES dirancang untuk membantu dalam pengolahan Rencana APBDes yang sistematis dan rinci serta memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan desa secara real-time, seperti penerimaan dan pengeluaran dana, dan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan, seperti realisasi anggaran, neraca dan kas (Mahin et al. 2024).



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Siskeudes



Gambar 2. Parameter Penganggaran

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Kendala yang ditemui pada implementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Penjor meliputi jaringan internet di Desa Penjor juga sering mengalami gangguan seperti saat hujan lebat dan terjadi pemadaman listrik, ini menyebabkan Aplikasi SISKEUDES tidak bisa diakses. Berbeda halnya dengan di daerah perkotaan yang mudah saat mengakses

Aplikasi SISKEUDES dikarenakan minimnya gangguan jaringan internet kecuali ketika adanya pemadaman listrik. Apabila aplikasi mengalami gangguan atau eror seperti tidak bisa di akses atau loading lama yang bisa menangani hanya pemerintah pusat atau kabupaten saja. Jadi ketika terjadi error pada aplikasi, pemerintah desa hanya bisa menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah pusat , dan apabila aplikasi tersebut sudah bisa digunakan kembali pemerintah pusat memberikan update informasi terbaru. Sebelum penggunaan aplikasi SISKEUDES pemerintah desa masih penginputan data secara manual yakni dengan menggunakan microsoft exel dan microsoft word. Namun menurut operator desa Penjor, cara ini masih belum efektif karena memerlukan waktu yang cenderung lama untuk menyelesaikannya, cara manual ini terkadang belum akurat sehingga masih bisa terjadi kesalahan teknis yang membuat operator desa harus membenahi ulang penginputan data. Setelah adanya aplikasi SISKEUDES operator desa melakukan penginputan data lebih mudah, seperti halnya sekarang dalam menginput data pembangunan desa lebih instan, dan tidak menghabiskan waktu lama, serta apabila terjadi kesalahan bisa langsung terdeteksi otomatis.

Pilar Pertama, *Information Dissermination*

Pada pilar ini menitikberatkan pada kegunaan dan aksesibilitas, yang berarti bahwa yang dipublikasikan harus bisa dijangkau dan bisa bermanfaat terhadap masyarakat (Ansyhariputra 2023). Berdasarkan riset yang sudah dilakukan penulis menyatakan bahwa masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi SISKEUDES secara langsung dikarenakan aplikasi ini bersifat privat. Jadi, data pada aplikasi SISKEUDES tidak bisa diakses secara langsung tanpa konfirmasi ke pemerintah terlebih dahulu. Untuk penyebaran informasi itu sendiri, pemerintah membuat baliho yang terpasang pada bagian depan kantor desa dan pada tempat umum.



Gambar 3. Baliho APBDes

Pilar Kedua, *Communication*

Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan *platform digital* sebagai alat komunikasi dua arah. Selain itu, pilar ini menekankan bahwa aplikasi *e-Government* seharusnya memberikan masyarakat kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan penyedia layanan melalui *platform* mereka (Rusnita, Aromatica, and Putera 2023). Berdasarkan hasil yang diperoleh, komunikasi

yang dimaksud didalam riset yaitu komunikasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap operator desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk menyukkseskan penggunaan aplikasi SISKEUDES di desa-desa. Untuk komunikasi pemerintah kepada masyarakat yaitu melalui Murenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), yang hasilnya akan ditetapkan oleh kepala desa untuk pengalokasian pada aplikasi SISKEUDES.

Pilar Ketiga, Transaction

Menurut pilar transaksi, *website* dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dan non-keuangan (Rusnita et al. 2023). Pemerintah dapat menyediakan layanan transaksi elektronik yang aman, efisien, dan efektif, warga negara dan perusahaan dapat melakukan transaksi elektronik dengan pemerintah . Dalam riset ini, transaksi yang dimaksudkan yaitu terkait pelaporan keuangan desa yang dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES. Pelaporan tersebut berisi tentang laporan pembangunan desa, laporan keuangan desa, dan laporan belanja desa lainnya. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat pada awal tahun 2024 yaitu sekitar 800 juta dan mendapatkan bonus 114 juta. Bonus tersebut diperoleh desa Penjor karena melakukan pengerjaan laporan data keuangan dengan waktu yang lebih singkat. Untuk bonus yang didapatkan desa Penjor dialokasikan untuk membangun jalan rabat (jalan setapak), sistem aliran air, dan plengsengan (tembok penahan tanah). Untuk DD (dana desa) itu sendiri dipergunakan untuk pembangunan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, pembinaan (BIMTEK), Penanganan kemiskinan BLT (Bantuan Langsung Tunai), program pencegahan dan penurunan stunting dan program pemerintahan yang lain. Perkembangan desa ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan ekonomi, sosial dan masyarakat, maka dari itu dapat mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan desa harus didukung oleh berbagai perspektif yang ada di desa (Hariyanto 1979). Tampilan pelaporan APBDes dan pelaporan RAB di dalam aplikasi yaitu seperti gambar dibawah ini:

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PENJOR
 NOMOR
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENJOR
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	27.300.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.607.081.958,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.634.381.958,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	537.322.778,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	425.024.224,00	
5.3	Belanja Modal	678.199.958,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	53.925.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.694.381.958,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gambar 4. Tampilan APBDes Dalam SISKEUDES

RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA PENJUR KECAMATAN PAGERWOJO				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Jenis APBDDes : DRAFT AWAL				
Bidang :		2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
Sub Bidang :		2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman		
Kegiatan :		2.4.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (**)		
Waktu Pelaksanaan :		2 Minggu		
Output/Keluaran :		Pembangunan Perpipaan Air Bersih ke Rumah Tangga		
KODE	U R A I N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	BELAKA			18.412.888,00
2.06.12	01. Pembangunan Perpipaan Air Bersih ke Rumah Tangga			18.412.888,00
2.2.7	Belanja Modal (Invasi/Embung/Drainase/Ris Limbah/Persempitan)			18.412.888,00
2.2.7.01	Belanja Modal (Invasi/Embung/Drainase/Ris) - Honor Tim Pelaksana Rag			700.000,00
	01. Honor	005	1 org/hag	300.000,00
	02. Sukuksara	005	1 org/hag	250.000,00
	03. Anggasa	005	1 org/hag	150.000,00
2.2.7.02	Belanja Modal (Invasi/Embung/Drainase/Ris) - Uyah Tenaga Kerja			3.180.000,00
	01. Tukang	005	14 Orh	88.000,00
	02. Kuli	005	42 Orh	80.000,00
	03. Uyah pemeliharaan dan gambar	005	1 Paket	280.000,00
2.2.7.03	Belanja Modal (Invasi/Embung/Drainase/Ris) - Bahan Baku/Material			13.480.000,00
	01. Pas Pvc 2" D	005	200 Linyr	88.000,00
	02. Lem Pvc	005	2 Keping	40.000,00
	03. Pasir Nama Proyek	005	1 Busa	200.000,00
2.06.12	01. Pembangunan Perpipaan Air Bersih ke Rumah Tangga di desa di			6,00
2.2.7	Belanja Modal (Invasi/Embung/Drainase/Ris) Limbah/Persempitan			6,00

Gambar 5. Tampilan RAB Dalam SISKEUDES



Gambar 6. Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)



Gambar 7. Pelatihan Dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa



Gambar 8. Pembangunan Tembok Penahan Tanah



Gambar 9. Pembangunan Saluran Irigasi



Gambar 10. Pembangunan Jalan Rabat

Pilar Keempat, *Interoperability (Integration)*

Integrasi data dan aplikasi sangat penting untuk *e-gov* karena memungkinkan satu data atau satu aplikasi saling terhubung dan digunakan secara bersamaan oleh lembaga pemerintah. Selain itu, *interoperability* berarti bahwa satu situs *website* menghubungkan halaman pemerintah yang berbeda di mana masing-masing lembaga memberikan berbagai jenis layanan (Rusnita et al. 2023). Pada penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa integrasi sempat direalisasikan berupa *website* pada setiap desa. Namun, untuk saat ini *website* desa tersebut belum bisa diakses kembali dengan keterangan masih ditangguhkan. *Website* desa itu sendiri sebenarnya memiliki

beberapa kegunaan, seperti publikasi kegiatan dalam pembangunan desa, penyimpanan arsip desa atau data-data lainnya.



Gambar 11. Website Desa

Pilar Kelima, *Participation*

Di Indonesia masih ada banyak tantangan untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meskipun pemerintah dan lembaga publik lainnya telah melakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, banyak orang masih merasa tidak memiliki kesempatan dalam proses pembangunan. Pada riset yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa, masyarakat hanya bisa mengetahui informasi terkait Transparansi dana desa dan pembangunan desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dan baliho yang telah terpasang.



Gambar 12. Musrenbangdes

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES di desa Penjor menggunakan pendekatan e - government Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017) yang terdiri dari 5 (lima) pilar yaitu *information dissemination, communication, transaction, integration, dan participation* dapat disimpulkan bahwa pilar pertama information, belum bisa dinyatakan berhasil dikarenakan keprivasian aplikasi tersebut

membuat masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi SISKEUDES. Pilar kedua *communication*, sudah berhasil karena pembinaan dari pemerintah pusat cukup jelas dan sudah dilakukan secara berkala. Namun, jika aplikasi mengalami *error* operator desa terkadang masih merasa kebingungan. Pilar ketiga *transaction* sudah bisa dinyatakan berhasil, dikarenakan penyediaan layanan berbasis *e-gov* ini sangat membantu pemerintah desa dalam penginputan data dan pelaporan keuangan dengan aman, efektif, efisien dan tidak membutuhkan waktu lama seperti pada saat masih menggunakan cara manual. Pilar keempat *integration* belum dinyatakan berhasil, karena aplikasi SISKEUDES belum bisa terintegrasi dengan aplikasi atau website lain. Pilar kelima *participation* juga belum bisa dinyatakan berhasil, dikarenakan masyarakat belum bisa mengakses aplikasi tersebut, akan tetapi mereka bisa mengetahuinya melalui Musrenbangdes dan baliho yang terpasang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Muhamad Tri Utama. 2022. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” 9(2):356–63.
- Anon. 2015. “Hukum Pemerintahan Daerah.”
- Anon. 2015. “Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.”
- Anon. 2015. “Bimtek Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi.”
- Ansyhariputra, Muhammad Syaifullah. 2023. “No Title.”
- Cahyono, Anang Sugeng, Dosen Fakultas, Sosial Politik, and Universitas Tulungagung. 2013. “Otonomi Daerah Dalam Rangka.” 0(1):72–87.
- Cahyono, Anang Sugeng, Merlis Sarahfina, and Bellinda Destaru. 2024. “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government.” 7(8):3088–94. doi: 10.56338/jks.v7i8.5994.
- Desa, Dana, and Add Terhadap. 2014. “Dampak Kebijakan Alokasi.”
- Desa, Masyarakat. n.d. “Angkasawati, Masyarakat Desa 1.” 1–23.
- Ehfdxvh, V. Surjuhvv, Wklv Fw, Uhjxodwh Pruh, Frpsuhkhqvli Wkdq, W. K. H. Suhylrxv, H. Solfdwlrq Dqg, Ohjdo Fhuwdlqw, R. I. Ylodjhv, Vwdwxv Gdq, Nhsdvwldq Kxnxp, Dwdv Ghvd, Gdodp Vlvwhp, Edux Pdvd, and Uhirupdvl Vdpsdl. n.d. “1l Pdwxo +xgd +xnxp 3hphulqwdkdq ’hvd Ododqj 6hwdud 3huv Kop ,Elg Kop [Ll ,Elg Kop L].” 7:1–8.
- Ekonomika, Fakultas, Universitas Kristen, Satya Wacana, Angela Ayu, Wilma Atintyasputri, Fakultas Ekonomika, Universitas Kristen, and Satya Wacana. 2019. “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangor Pendahuluan Dalam Rangka Memperbaiki Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat .,” 2(Juni):169–93.
- Hariyanto, Slamet. 1979. “Analisis Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Situational Leadership Analysis of Village Headman in Nglutung , Village Development , Sendang District , Tulungagung Regency.” 13(2):144–52.
- Hidayani, Sandra, Kamilah Kamilah, and Khairina Tambunan. 2023. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Banyumas Kecamatan Stabat.” 8(3):406–17.
- Jdih.Kemenkeu. 2023. “Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023.” *Djpk.Kemenkeu.Go.Id* 1–56.

- Mahin, Mikael, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl Y. C. Oevang Oeray, and Badan Pengawasan. 2024. "Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Dan Kabupaten Kapuas Hulu." (September):512-18.
- Romanti. 2023. "Mengenal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Transformasi Menuju Efisiensi Dan Transparansi." *Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia* 1.
- Rusnita, Widya Cancer, Desna Aromatic, and Roni Ekha Putera. 2023. "Evaluasi Program E-Kelurahan Di Kota Padang Menggunakan E- Government Maturity Model." 12(1):185-96.
- Sutrisno, Adi. 2001. "Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan." 7(1):13-23.
- Zaliluddin, Dadan, Budiman Budiman, and Ade Rully. 2020. "Implementasi E-Government Berbasis Android." *JSil (Jurnal Sistem Informasi)* 7(2):83-88. doi: 10.30656/jsii.v7i2.2052.